

LAPORAN KINERJA

BPTP SUMATERA SELATAN



BPTP SUMATERA SELATAN
BADAN LITBANG PERTANIAN
2022

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Pelaporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara.

Laporan disusun untuk memberikan gambaran yang nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BPTP Sumsel di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi semua pihak khususnya para penanggung jawab kegiatan masing-masing terutama dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, hingga laporan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, masukan dan saran untuk perbaikan dan tercapainya kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dinantikan.

Palembang, Januari 2023

Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, SP., MP
NIP.197106131998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022, merupakan tahun ketiga dari operasional strategi pembangunan pertanian dalam kurun waktu lima tahunan (2020-2024). Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan sebagai ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan) dalam melakukan pengkajian bidang pertanian, berperan aktif menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah, dalam rangka peningkatan dukungan inovasi dan teknologi sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.

Untuk mengukur kinerja kegiatan Tahun 2022, telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTP Sumsel, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target. Sasaran strategis tersebut adalah : (1). Meningkatnya Pemanfaatannya Teknologi dan Inovasi Pertanian, (2). Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan (3). Terkelolanya Anggaran badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, kedua sasaran strategis ini diukur dengan empat Indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (jumlah), (2). Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%), (3). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai) dan (4). Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun 2022 diimplementasi beberapa kegiatan pendampingan. Selain itu untuk menunjang berlangsungnya kegiatan di BPTP Sumsel, peningkatan kemampuan SDM, sarana/prasarana pengkajian mendapat perhatian besar.

BPTP Sumsel mendapatkan biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA 2022, sebesar Rp8.280.523.000,-. Realisasi anggaran BPTP Sumatera Selatan sebesar Rp8.116.166.002 (98,02%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4.313.300.928 (96,83%), belanja barang Rp3.683.280.478 (99,39%) dan belanja modal Rp119.584.596 (99,65%).

Peningkatan kinerja Balai ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan. Upaya ini dapat ditempuh antara lain antara lain melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pemantapan

kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

Kata kunci : LAKIN, renstra, sasaran, tujuan, realisasi.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	ii
	IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
	DAFTAR ISI.....	v
	DAFTAR TABEL.....	vi
	DAFTAR GAMBAR.....	vii
	DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1.Latar Belakang.....	1
	1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan organisasi BPTP.....	5
II.	PERENCANAAN KINERJA.....	9
	2.1. Visi	9
	2.2. Misi.....	10
	2.3. Tujuan dan Sasaran.....	10
	2.3.1. Tujuan.....	10
	2.3.2. Sasaran.....	10
	2.4. Kegiatan BPTP SUMSEL Tahun 2022.....	11
	2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
	3.1. Capaian Kinerja.....	15
	3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022.....	15
	3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2020-2024.....	24
	3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	25
	3.1.4 Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan Lainnya	27
	3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	28
	3.2.1 Realisasi Keuangan.....	28
	3.2.2 PNBPN.....	30
IV.	PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kegiatan BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022.....	11
2. Perjanjian Kinerja BPTP Sumsel Tahun 2022.....	14
3. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Tahun Anggaran 2022...	13
4. Pengukuran Kinerja BPTP Sumsel Tahun 2022.....	17
5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan.....	18
6. Capaian jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir).....	19
7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.....	22
8. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku).....	23
9. Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2020-2024.....	24
10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022.....	28
11. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022.....	29
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPTP Sumsel Tahun 2022	30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi BPTP Sumsel.....	8
2. Piagam Penghargaan BPTP Sumatera Selatan Juara 1 Kanwil DJKN SJB Award.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perjanjian Kinerja BPTP Sumatera Selatan Tanggal 17 Desember 2022.....	33
2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Lingkup Balitbangtan Tahun 2022.....	35
3. Nilai Kinerja Anggaran BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022.....	39

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2022 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan Tahun 2022 merupakan LAKIN tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPTP Sumatera Selatan Tahun 2020-2024. LAKIN BPTP Sumatera Selatan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Sumatera Selatan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat laporan LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Menurut Rider Dale (2004), Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi

dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

Sebagai Institusi pusat yang berada di daerah dan merupakan ujung tombak Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan) dalam melakukan pengkajian bidang pertanian, maka BPTP Sumatera Selatan berperan aktif dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah (Peraturan Menteri Pertanian No:20/Permentan/OT.140/3/2013). Hal ini terkait dengan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2017-2045, dimana pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Diyakini, bahwa berkembangnya sektor pertanian yang maju akan mendorong berkembangnya sektor lain terutama sektor hilir (*agriculture industries and services*) yang maju pula.

Visi pembangunan pertanian 2017-2045 adalah **“terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang terkait erat dengan tupoksi Balitbangtan adalah:

1. Mengembangkan sistem usahatani pertanian tropika agroekologi yang berkelanjutan dan terpadu dengan bioindustri melalui perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetik, serta perluasan, pengembangan dan konservasi lahan pertanian;

2. Mengembangkan kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi dalam Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan melalui perlindungan dan pemberdayaan insan pertanian dan perdesaan;
3. Membangun sistem pengolahan pertanian melalui perluasan dan pendalaman pasca panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan guna menumbuhkan nilai tambah;
4. Mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi.

Disadari pula bahwa capaian kinerja BPTP Sumsel tidak hanya dalam pelaksanaan program/kegiatan, namun juga dipengaruhi pemerintah daerah, institusi lain, bahkan petani dan peternak sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kebijakan dan program yang disusun di tingkat pusat dan sebagian kegiatan disusun di tingkat BPTP, haruslah mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini yaitu: (1). Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2). Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3). Belum optimalnya sistem perbenihan, (4). Terbatasnya akses petani terhadap permodalan, (5). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, dan (6). Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah, demikian juga antar sektor.

Sumatera Selatan dengan kekayaan agroekosistemnya seperti lebak, pasang surut, irigasi, tadah hujan dan lahan kering memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan misi pembangunan pertanian 2017-2045 tersebut. Dukungan teknologi untuk pengembangan pertanian telah tersedia melalui jasa penelitian dan pengkajian yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Penelitiannya. Sebagian teknologi tersebut telah tersebar di tingkat pengguna dan stakeholder, namun untuk pengembangannya ke target yang lebih luas lagi memerlukan upaya percepatan.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi BPTP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPTP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah. BPTP bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).

b. Tugas Pokok

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPTP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
7. Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
9. Pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Untuk menjalankan program dalam wujud berbagai kegiatan, BPTP Sumsel memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 48 orang. Tenaga-tenaga ini tersebar di kantor BPTP Sumsel 39 orang, di Kebun Percobaan Kayu Agung di Kabupaten OKI 6 orang, dan di Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 3 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Secara fungsional dibantu oleh Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi dan kelompok fungsional.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.

b. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

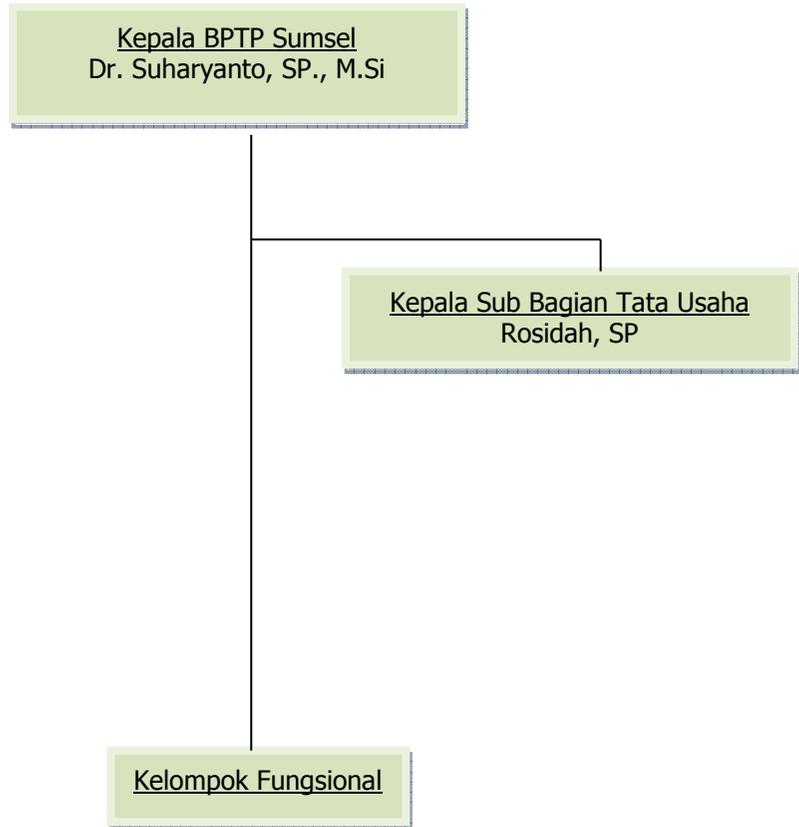
Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, informasi, dokumentasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, pelayanan teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi, pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi.

Sub Koordinator Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam menyusun program pengkajian/pengembangan agar terarah, mantap dan tajam sehingga dapat menghasilkan tujuan dan sasaran yang terukur, rasional dan tepat sasaran, selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Penyuluh Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sumsel

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi Balitbangtan merupakan bagian integral dari visi pertanian dan perdesaan, dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan perdesaan. Persepsi itu diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran Balitbangtan untuk merealisasikan tujuannya. Visi Balitbangtan bersifat futuristik yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi akselerator pembangunan pertanian perdesaan dan menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian di masa depan.

Sebagai instansi vertikal dari Balitbangtan, dan di bawah koordinasi Balai Pengkajian teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BPTP Sumatera Selatan juga mempunyai visi yang mengacu pada instansi induk tersebut. Disamping itu juga, visi BPTP Sumatera Selatan tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimana BPTP Sumsel berada, karena BPTP Sumatera Selatan menjadi ujung tombak Balitbangtan dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPTP Sumatera Selatan, visi dan misi Balitbangtan serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; BPTP Sumatera Selatan mempunyai **visi**: Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi, misi yang dilaksanakan BPTP Sumatera Selatan adalah:

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan :

Sebagai instansi vertikal dari Balitbangtan, BPTP Sumatera Selatan mempunyai tujuan yang sama dengan BBP2TP, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan inovasi teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi
2. Meningkatkan penyebarluasan inovasi teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi

2.3.2. Sasaran :

1. Tersedianya inovasi teknologi pertanian unggulan.
2. Meningkatnya penyebarluasan (diseminasi) inovasi teknologi pertanian.
3. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional (dibidang pengkajian, diseminasi dan pendayagunaan inovasi teknologi pertanian).

4. Meningkatnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian.
5. Meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian.

2.4. Kegiatan BPTP Sumsel TA 2022

Pada Tahun 2022, sesuai dengan anggaran yang ada didalam DIPA dan POK, BPTP Sumatera Selatan mengimplementasikan kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja. Kegiatan BPTP Sumatera Selatan pada Tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan diseminasi dan dukungan manajemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Judul Kegiatan Tahun 2022
1	Diseminasi Teknologi Pertanian
2	Benih Padi
3	Benih Jagung
4	Layanan BMN
5	Layanan Umum
6	Layanan Perkantoran
7	Layanan Sarana Internal
8	Layanan Prasarana Internal
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
11	Layanan Manajemen Keuangan

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTP Sumsel, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja dan target, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPTP Sumsel Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (jumlah)	18
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	80
3.	Terkelolanya Anggaran badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	85

Alokasi anggaran BPTP Sumatera Selatan pada tahun 2022 sampai akhir bulan Desember telah mengalami dua belas kali revisi anggaran, semula sebesar Rp15.021.596.000,- dan setelah revisi ke dua belas pada bulan Desember menjadi Rp8.280.523.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	%
1801.DDA.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	50.000.000	0,60
1801.DDA.504	Benih Padi	500.000.000	6,01
1801.DDA.506	Benih Jagung	320.000.000	3,86
1809.EBA.956	Layanan BMN	408.651.000	4,94
1809.EBA.962	Layanan Umum	86.199.000	1,04
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.325.473.000	76,39
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	89.500.000	1,08
1809.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	30.500.000	0,37
1809.EAF.010	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	361.300.000	4,36
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	41.000.000	0,50
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	67.900.000	0,82
Total		8.280.523.000	100

Adapun masing-masing kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPTP Sumatera Selatan per Output Kegiatan Utama sebagai berikut:

1. Diseminasi Teknologi Pertanian, dengan target ouput adalah terdiseminasinya 1 paket teknologi komoditas strategis ke pengguna.

2. Benih Padi, dengan target output adalah tersedianya produksi benih sumber sebanyak 21 Ton terdiri dari 5 ton benih sumber padi (FS), dan 16 ton benih sumber padi (SS).
3. Benih Jagung, target output adalah 5 ton benih sebar jagung.
4. Layanan BMN , target output adalah 1 layanan.
5. Layanan Umum, target output adalah 1 layanan.
6. Layanan Perkantoran, dengan target outputnya 1 layanan perkantoran di BPTP Sumatera Selatan.
7. Layanan Sarana Internal, target outputnya 1 unit.
8. Layanan Prasarana Internal, target outputnya 1 unit.
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran, dengan target outputnya 1 Dokumen.
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan target outputnya 1 Dokumen.
11. Layanan Manajemen Keuangan, dengan target outputnya 1 Dokumen.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022

Pada tahun anggaran 2022, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2022-2024, BPTP Sumatera Selatan menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1). Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi, (2). Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan (3). Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, ketiga sasaran strategis ini diukur dengan empat indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan, (2). Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%), (3). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan (4). Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku).

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1). Spesifik dan jelas, (2). Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3). Harus Relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5). Harus fleksibel dan sensitif dan (6). Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1). Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2). Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2022. Ukuran keberhasilan dalam setiap indikator kerja dilakukan dengan membuat kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan metode skoring: sangat berhasil (capaian $\geq 100\%$), berhasil (80-99%), cukup berhasil (60-79%), dan kurang berhasil ($< 60\%$) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja BPTP Sumsel Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	18 paket teknologi	35 Paket teknologi	194,4
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	0	0	0
2	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	80	80.17	100.2
3	Terkelolanya Anggaran badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	85	89.16	104.8

Berdasarkan tabel 4, capaian indikator kinerja BPTP Sumatera Selatan ada beberapa yang melebihi 100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu (1). Sangat berhasil jika capaian > 100%; (2). Berhasil jika capaian 80-100%; (3). Cukup berhasil jika capaian 60-79%; (4). Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Bila dilihat capaian kinerja sasaran strategis pada tabel 4, secara umum capaian kinerja untuk BPTP Sumatera Selatan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indikator kinerja yang dapat mencapai nilai lebih dari 100% adalah (1) Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan spesifik lokasi yang dimanfaatkan, (2) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPTP Sumsel, dan (3) Nilai kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.

Pengukuran capaian kinerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2022 diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 BPTP Sumsel diuraikan melalui capaian kinerja setiap sasaran, yang menggambarkan realisasi yang dicapai dari target yang sudah ditetapkan melalui indikator kerjanya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Untuk mencapai sasaran satu tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja, yaitu (1). Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan, dan (2). Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	18 Paket teknologi	35 Paket teknologi	194,4

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2022 telah tercapai. Adapun Rincian dari paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

Tahun	Teknologi	Lokasi dimanfaatkan	Jumlah
2018	1. Teknologi (Adaptasi) Penggunaan Atabela Amator untuk Penanaman Kedelai di Lahan Kering Masam.	Kab. PALI	11
	2. Teknologi Budidaya Jagung sebagai tanaman sela karet yang belum menghasilkan.	Kab. Banyuasin	
	3. Teknologi Pembuatan Pakan fermentasi Dari Limbah Tanaman Jagung	Kab. Banyuasin	
	4. Teknologi Budidaya Kedelai di lahan kering masam untuk mendukung perbenihan kedelai	Kab. PALI	
	5. Teknologi Perbenihan Padi	Kab. OKUT dan Kab. OKI	
	6. Teknologi Budidaya Ayam KUB	Kab. OKI	
	7. Teknologi Perbenihan Jagung	Kab. Indralaya dan Kab. Muara Enim	
	8. Teknologi Pakan Fermentasi Jerami Padi	Kec. Gelumbang kab. Muara Enim	
	9. Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Kerbau menjadi Pupuk Organik	Kec. Gelumbang kab. Muara Enim	
	10. Inovasi Paket Teknologi Budidaya Bawang Merah	Kab. Banyuasin	
	11. Inovasi Paket Teknologi Budidaya Cabai Merah	Kab. Banyuasin	
2019	1. Paket Teknologi Budidaya Kedelai Tahan Naungan	Desa Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kab. PALI	10
	2. Paket Teknologi Budidaya Kopi Robusta	Desa Sidodadi Kec. Banding Agung Kab. OKUS	
	3. Paket Teknologi Budidaya Jagung Toleran Genangan Spesifik Lokasi	Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA	

Tahun	Teknologi	Lokasi dimanfaatkan	Jumlah		
	4. Paket Teknologi Budidaya Padi menggunakan Varietas Unggul Baru di Lahan Pasang Surut	Desa Telang Karya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin			
	5. Teknologi Pakan Fermentasi Jerami Padi, selasah jagung	Desa Rantau Durian I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI			
	6. Teknologi Perbenihan Padi	Kab. OKUT dan Kab. OKI			
	7. Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	Kab. Banyuasin dan Kab. OKI			
	8. Teknologi Budidaya Ayam KUB	Kab. OKI			
	9. Inovasi Paket Teknologi Budidaya Bawang Merah	Kota Pagaram			
	10. Inovasi Paket Teknologi Budidaya Kerbau Rawa Pampangan	Kec. Pampangan dan Kec. Jejawi Kab. OKI			
	2020	1. Teknologi Teknologi Padi Gogo dengan Sistem Largo Super		Desa Rantau Durian I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI	7
		2. Paket Teknologi Pasca Panen Kopi		Desa Sidodadi Kec. Banding Agung Kab. OKUS	
		3. Paket Teknologi Proliga Cabai Merah		Desa Tanjung Pering Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir	
	4. Paket Teknologi Jagung di Lahan Masam	Kab. Banyuasin			
	5. Teknologi Budidaya Ayam KUB	Kab. Ogan Ilir dan OKI			
	6. Teknologi Perbenihan Padi	Kab. OKUT dan Kab. OKI			
	7. Inovasi Paket Teknologi Budidaya Padi Rawa Insentif di Lahan Pasang Surut	Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kab. MUBA dan Desa Sukamulia Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyu Asin			
2021	1. Paket Teknologi Budidaya Sayuran di Lahan Pekarangan	Kota Palembang dan Kab. OKI	4		
	2. Paket pengembangan VUB Padi Khusus dan VUB Spesifik Lokasi	Kab. Musi Rawas dan Kab. OKI			

Tahun	Teknologi	Lokasi dimanfaatkan	Jumlah
	3. Teknologi Perbenihan Padi	Kab. OKUT dan Kab. OKI	
	4. Teknologi Budidaya Ayam KUB	Kab. Ogan Ilir dan Kab. OKI	
2022	1. Teknologi Perbenihan Padi	Kab. OKUT dan Kab. OKI	3
	2. Teknologi Perbenihan Jagung	Kab. Ogan Ilir dan Kab. OKI	
	3. Teknologi Budidaya Ayam KUB	Kab. OKI	

Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan, merupakan indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran dimanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi. Indikator kinerja kedua yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 0% dan tercapai 0% karena adanya recofucing anggaran yang menyebabkan Output kegiatan Teknologi Spesifik lokasi tidak bisa dilakukan pada tahun ini.

Sasaran 2: Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran terwujudnya birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima memiliki indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	80	80,17	100,2

Pembangunan nilai ZI dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh Instansi pemerintah, sehingga pada periode Renstra 2020-2024, di seluruh satker Lingkup Balitbangtan, mempunyai Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim *assesor* yang merupakan Tim Penilai Internal Balitbangtan yang telah

disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala Balitbangtan). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*. BPTP Sumsel mendapat nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPTP Sumsel Tahun 2022 sebesar 80,17 (SK penilaian terlampir).

Sasaran 3: Terkelolanya Anggaran badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas memiliki indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BPTP Sumsel (berdasarkan regulasi yang berlaku).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	85	89,16	104,8

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel

sebagai berikut: (1). Capaian keluaran (output), (2). Penyerapan anggaran, (3). Efisiensi, dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Nilai Kinerja BPTP Sumsel hingga 31 Desember 2022 mencapai nilai 89,16 dari target 85 dengan capaian kinerja 104,8%, dengan rincian sebagai berikut: (1). Capaian keluaran (output) 100%, (2). Penyerapan anggaran sebesar 98,02%, (3). Efisiensi sebesar 5.22% dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Konsistensi RPD Akhir) sebesar 99,54%.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2020-2024

Jika membandingkan dengan target tahun 2022 yang terdapat pada Renstra tahun 2020-2024, secara umum capaian kinerja BPTP Sumatera Selatan tahun 2022 mencapai target (Tabel 9).

Tabel 9. Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra					Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 dibandingkan Target 2022 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (jumlah)	16	18	19	20	21	35	194,4
Rasio hasil pengkajian (ouput akhir) spesifik lokasi terhadap seluruh ouput hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	95	95	96	96	96	-	-

Nilai Pembangunan Zona Integritaas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	64	65	85	69	72	80,17	100,2
Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90	90	85	90	90	89,16	104,8

Untuk indikator rasio kegiatan pengkajian spesifik lokasi yang menghasilkan output akhir terhadap seluruh kegiatan pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%), pada tahun 2022 pada perjanjian kinerja mempunyai indikator yang berbeda dengan yang terdapat pada Renstra 2020 – 2024. Indikator kedua pada perjanjian kinerja pada tahun 2022 yaitu presentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%).

3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPTP Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2022 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1). kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2). intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3). input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pendampingan, (4). kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumber daya manusia (tenaga fungsional, dan tenaga

administrasi) dan (5). sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA BPTP Sumatera Selatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1). Sebagian kegiatan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan dalam hal penentuan lokasi dan calon petani kooperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan dan (2). sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BPTP dalam melaksanakan kegiatannya yaitu kendala administrasi merupakan hal yang pengaruh dalam merealisasikan kegiatan terutama kurangnya tenaga administrasi

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BPTP Sumatera Selatan adalah: (1). Melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, (2). peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, (3). peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan (4). pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

3.1.4 Capaian Kinerja BPTP Sumatera Selatan Lainnya

Kerjasama

Capaian kinerja BPTP Sumatera Selatan antara lain kerjasama dengan pihak luar yaitu:

1. Kerjasama antara BPTP Sumatera Selatan dengan PT. Pupuk Sriwidjaja tentang kerjasama riset dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kerjasama antara BPTP Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan dengan Universitas Sumatera Selatan Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Di Bidang Pertanian.
4. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Di Bidang Pertanian.
5. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan dengan Pemerintah Desa Tanjung Lenggayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU tentang Pendampingan Penangkaran Benih Varietas Unggul Baru Jagung Hibrida.
6. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan dengan SMK Xaverius Palembang tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Di BPTP Sumatera Selatan.
7. Kerjasama BPTP Sumatera Selatan dengan SMK Bakti Ibu 3 Palembang tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Di BPTP Sumatera Selatan.

Penghargaan Pengelola Barang Milik Negara

Tahun 2022, BPTP Sumatera Selatan menerima piagam penghargaan dari Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung atas prestasi sebagai Juara 1 (satu) Kanwil DJKN SJB Award pada kelompok 1 (Korwil yang memiliki Satker dibawahnya) untuk Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Wilayah

Sumatera Selatan. Piagam Penghargaan yang diterima BPTP Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Piagam Penghargaan BPTP Sumatera Selatan Juara 1 Kanwil DJKN SJB Award.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Keuangan

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2022, pagu awal total anggaran BPTP Sumatera Selatan sebesar Rp15.021.595.000,-. Akibat adanya penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran BPTP Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2022 menjadi Rp8.280.523.000,-. Realisasi anggaran BPTP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2022 berdasarkan data SPAN sebesar Rp8.116.166.002,- (98,02%) sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp164.356.998,- (1,98%). Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1801.DDA.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	50.000	49.985	99,97
1801.DDA.504	Benih Padi	500.000	499.479	99,90
1801.DDA.506	Benih Jagung	320.000	314.649	98,33
1809.EBA.956	Layanan BMN	408.651	407.094	99,62
1809.EBA.962	Layanan Umum	86.199	84.145	97,62
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.325.473	6.173.120	97,59
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	89.500	89.500	100
1809.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	30.500	30.085	98,64
1809.EBB.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	41.000	40.870	99,68
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	67.900	67.230	99,01
Total		8.280.523	8.116.166	98,02

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 11. Realisasi anggaran BPTP Sumatera Selatan sebesar Rp8.116.166.002 (98,02%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4.313.300.928 (96,83%), belanja barang Rp3.683.280.478 (99,39%) dan belanja modal Rp119.584.596 (99,65%).

Tabel 11. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1.	Belanja Pegawai	4.454.473	4.313.301	96,83
2.	Belanja Barang	3.706.050	3.683.280	99,39
3.	Belanja Modal	120.000	119.585	99,65

3.2.2 PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPTP Sumatera Selatan TA 2022 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBPs BPTP Sumsel yang diperoleh dari hasil penjualan benih padi (UPBS), KP Kayu Agung, KP Karang Agung, Sewa bangunan rumah dinas/mess, hasil dari lelang barang milik negara.

BPTP Sumatera Selatan juga menyetorkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 sebesar Rp396.846.315,- dengan rincian seperti pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPTP Sumsel Tahun 2022

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1.	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20.251.000
2.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.514.315
3.	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	17.217.000
4.	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	357.864.000
		Jumlah PNBPs	396.846.315

IV. PENUTUP

Peningkatan kinerja BPTP Sumsel terus dilakukan setiap tahunnya sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPTP Sumsel. Laporan Kinerja tahun ke tiga dari pelaksanaan Renstra BPTP Sumsel 2020-2024 yang merupakan wujud pertanggung jawaban kepada Negara dan Masyarakat, sebagaimana sasaran dan indikatornya telah mengacu pada format penyusunan LAKIP pada Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan target yang ditetapkan, secara keseluruhan kinerja BPTP Sumsel memenuhi kategori sangat berhasil dalam capaian target sesuai perencanaan. Seluruh indikator kinerja mencapai nilai > 100 % (Sangat berhasil) yaitu indikator:

1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan dengan nilai capaian 194,5%;
2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dengan nilai capaian 100,2%;
3. Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Berdasarkan regulasi yang berlaku) dengan capaian 104,8%.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	18
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	80
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	85

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
Program Riset dan Inovasi IPTEK		
Kegiatan:		
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp	870.000.000,-
Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan:		
Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	7.410.523.000,-

Jakarta, 17 Desember 2022

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan

Fadjry Djufry


Suharyanto

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR : 1409/Kpts/PW.410/H/08/2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian, perlu dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan hasil penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 124/Kpts/RC.010/H/01/2022 tentang Panduan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Realisasi
1	BB Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	94,97
2	BPTP Riau	94,42
3	BPTP Sumatera Utara	93,62
4	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	92,33

Lampiran 2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Lingkup
Balitbangtan Tahun 2022

5	BPTP Maluku Utara	92,24
6	Loka Penelitian Sapi Potong	92,01
7	Balai Penelitian Tanah	91,03
8	BPTP Papua	90,69
9	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	89,91
10	Balai Besar Penelitian Veteriner	89,74
11	Loka Penelitian Kambing Potong	89,51
12	BPTP Nangroe Aceh Darusalam	89,07
13	Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian	88,89
14	BPTP Banten	88,77
15	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	88,47
16	Balai Penelitian Lahan Rawa	88,25
17	BPTP Sumatera Barat	88,02
18	BPTP Bengkulu	87,76
19	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	87,48
20	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	87,42
21	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi	87,37
22	Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian	86,51
23	BPTP Sulawesi Tenggara	86,51
24	Balai Besar Pasca Panen Pertanian	86,41
25	BPTP Maluku	85,97
26	Loka Penelitian Penyakit Tungro	85,53
27	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	85,25
28	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	84,87
29	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	84,84
30	Balai Penelitian Tanaman Industri	84,67
31	Balai Penelitian Ternak	84,58
32	BPTP Gorontalo	84,49
33	Sekretariat Badan Litbang Pertanian	84,22
34	BPTP Kalimantan Tengah	84,11
35	BPTP Jambi	83,93
36	Balai Penelitian Tanaman Palma	83,91
37	BPTP Bali	83,57
38	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Subtropika	83,54
39	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	83,26
40	BPTP Jawa Barat	83,25
41	Balai Penelitian Tanaman Serealia	83,01

42	BPTP NTT	82,71
43	BPTP DKI Jakarta	82,61
44	BPTP Kepulauan Riau	82,55
45	BPTP Jawa Tengah	82,44
46	BPTP Bangka Belitung	82,38
47	BPTP Jogjakarta	81,95
48	BPTP Kalimantan Timur	81,69
49	BPTP Lampung	81,16
50	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	80,93
51	BPTP Sulawesi Barat	80,54
52	BPTP Sulawesi Tengah	80,51
53	BPTP Kalimantan Barat	80,48
54	BPTP Sumatera Selatan	80,17
55	BPTP Kalimantan Selatan	80,09
56	BPTP Papua Barat	79,98
57	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	78,74
58	BPTP Sulawesi Selatan	78,23
59	BPTP Jawa Timur	75,64
60	BPTP Sulawesi Utara	75,02
61	Balai Penelitian Tanaman Hias	73,99

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022
PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN,



EADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Lampiran 3. Nilai Kinerja Anggaran BPTP Sumatera Selatan Tahun 2022

